

MEDIA KALTIMTARA

KAMIS,
24 AGUSTUS
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

DUKCAPIL OPTIMALKAN LAYANAN JEMPUT BOLA

BACA HALAMAN 2



KONTINGEN PELAJAR KALTARA MENUJU POPNAS XVI PALEMBANG

BACA HALAMAN 9

Optimalkan Layanan Jemput Bola

Upaya Disdukcapil untuk Melayani Administrasi Kependudukan

TANJUNG SELOR - Menjelang tahapan pesta demokrasi yang dihelat secara serentak pada 2024 mendatang, salah satu syarat bagi para pemilih yaitu genap berusia 17 tahun atau telah mengantongi identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasalnya, di Wilayah Kaltara masih ada masyarakat yang belum mengantongi identitas itu, meski sudah genap berusia 17 tahun atau lebih. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara dalam waktu dekat bakal melaksanakan program jemput bola. Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan warga, jadi tidak hanya KTP termasuk identitas penting lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Disdukcapil Kaltara, Sumaji. Pihaknya sedang mengejar capaian perekaman pembuatan KTP di Kaltara, apalagi utamanya pada pemilih pemula. "Termasuk kita akan memfasilitasi Disdukcapil Bulungan, dalam mengurus administrasi kependudukan ke Long Lejuh dan desa sekitarnya," ujarnya, Rabu (23/8/2023).

Sementara, pada 24-29 Agustus pihaknya akan melayani masyarakat di Krayan, dengan berkolaborasi oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan.

"Selain perekaman kita melayani pembuatan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Bahkan bisa dilakukan cetak ditempat," katanya.

Ia melanjutkan, tahun ini perekaman ditargetkan sebesar 99,22 persen. Kemudian untuk akta kelahiran ditargetkan 98 persen. Hingga saat ini, khusus perekaman di Kaltara sudah sampai 99,7 persen.

Hal itu terus dioptimalkan, utamanya pada wilayah yang jauh atau akses yang sulit. Karena, yang ak-



MARTINUS/MKR

Sekretaris Disdukcapil Kaltara, Sumaji saat diwawancarai sejumlah awak media.

sesnya dekat dengan Kabupaten dan Kota mampu dilayani secara mandiri atau mendatangi kantor Disdukcapil terdekat.

Program jemput bola, guna meningkatkan capaian perekaman KTP dan dokumen kependudukan. Bahkan, program jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat, khususnya mereka yang sakit dan lansia serta masyarakat di daerah pelosok agar mendapatkan layanan perekaman.

Disamping itu, manfaat dari administrasi kependudukan dapat digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional

mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan.

"Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional dan terpadu, dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



Gubernur Kaltara Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi dan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi

TANJUNG SELOR - Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltara. Acara tersebut digelar di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Selasa (22/8/2023). Rakor ini dihadiri oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.

Rapat tersebut melibatkan kepala daerah dari berbagai wilayah di Provinsi Kaltara. Acara ini turut dirangkai dengan acara Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Paksi)/Ahli Pembangun Integritas (API) Provinsi Kaltara, serta Pembukaan dan Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Pemenuhan Data Pendukung

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2023 se-Kaltara.

Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, Gubernur Kaltara mengucapkan selamat datang di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kaltara kepada Bapak Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan KPK RI, beserta jajaran atas perhatian serta dukungannya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh daerah.

"Kami jajaran Pemprov Kaltara dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kaltara mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan perhatian dan dorongan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, memegang teguh integritas, meningkatkan transparan dan akuntabel, serta mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi

si dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik," ujar Gubernur Zainal Paliwang.

Gubernur Zainal menyoroti hubungan erat antara pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan pembangunan. Ia menekankan pentingnya memperbaiki sistem pengendalian dan pencegahan secara terus-menerus guna mencegah potensi penyimpangan dan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Zainal mengungkapkan berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan oleh Pemprov Kaltara. Ini termasuk Mou integritas untuk pemberantasan korupsi. Lalu, penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi pemerintah daerah se-Provinsi Kaltara, pelaksanaan survei penilaian integritas terhadap pelayanan publik yang di supervi-

si oleh KPK secara independen, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov Kaltara dengan Kajati dan Kapolda dalam rangka penanganan pengadilan masyarakat.

Selain itu, ada juga MoU penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemprov Kaltara dan kejaksaan

tinggi Kalimantan Timur (Kaltim), Optimalisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dan perjanjian kerja sama dalam rangka pengamanan aset khususnya tanah Pemda yang difasilitasi oleh KPK.

Tak hanya itu, Zainal juga menyampaikan beberapa upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kaltara yang disupervisi oleh KPK.

Pertama, program pencegahan korupsi terintegrasi yang merupakan bagian dan peran KPK dalam mengkoordinasi dan memonitoring upaya-upaya pencegahan korupsi.

Implementasi pencegahan korupsi terintegrasi ini, bahkan telah melalui tahap identifikasi titik rawan korupsi, penandatanganan komitmen, penetapan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dan monitoring evaluasi capaian aksi melalui portal (jaga.id) KPK secara berkala.

Dimana hal tersebut berfokus pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah pada 8 area intervensi. Antara lain, Perencanaan

dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Perizinan, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Alhasil, capaian pemenuhan rencana aksi nasional Korsupgah KPK Provinsi Kaltara tahun 2022 sebesar 86 persen dan berada pada 'Zona Hijau'.

Gubernur menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, selaku Ketua dan Penanggungjawab Pelaksana Rencana Aksi Korsupgah KPK dan seluruh kepala OPD pengampu area intervensi agar terus meningkatkan kinerja dan capaian pemenuhan indikator rencana aksi nasional Provinsi Kaltara sampai akhir tahun 2023.

"Demikian pula kepada Bupati/Walikota se-Kaltara, saya mengingatkan untuk segera melakukan tindak lanjut peningkatan capaian indikator pemenuhan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 ini," imbuhnya.

Kedua, lanjut Gubernur, adalah program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) pada Pemprov Kaltara dengan aksi perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan mendorong fasilitas pelayanan kesehatan provinsi melalui sistem pencatatan rekam medis elektronik dan terintegrasi dalam platform "satusehat", serta penyelesaian

tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta.

Ketiga, monitoring kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dimana, LHKPN Pemprov Kaltara per 31 maret 2023, untuk ASN telah dilaksanakan 100 persen.

Keempat, Provinsi Kaltara pada tahun 2023 sedang melaksanakan pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) secara nasional atas pelayanan publik yang diberikan. Dan kelima, dalam mendukung KPK RI dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan, saat ini Pemprov melalui BPSDM, Inspektorat dan Dinas Pendidikan aktif dalam mengikuti program sertifikasi penyuluh antikorupsi bersama KPK.

Kompetensi penyuluh antikorupsi ini diharapkan dapat memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang budaya antikorupsi, sehingga masyarakat semakin bertambah wawasannya dan dapat mengawasi jalannya program pemerintahan dengan lebih baik, efektif, bebas dari perilaku korupsi.

"Semua upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya antikorupsi dan mengawasi jalannya program pemerintahan dengan lebih efektif dan bebas dari perilaku korupsi," tutup Gubernur Kaltara. (dkisp)





HUMAS BAWASLU

Pimpinan Bawaslu Kaltara, Sulaiman saat memaparkan materinya kepada peserta pemilu, calon DPD Kaltara dan unsur stakeholder terkait.

Atensi Parpol Ikuti Aturan Main Dalam Kampanye

TANJUNG SELOR - Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) melibatkan seluruh stakeholder terkait gelar sosialisasi yang berkaitan dengan tahapan dan jadwal kampanye pada pemilihan umum tahun 2024, di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.

Bawaslu melihat, banyak bertebaran baliho dan spanduk yang sudah bermuatan unsur kampanye, yang sengaja di pasang oleh orang tertentu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan, jika mengaju pada regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, tahapan kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Bawaslu turut serta melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara. Termasuk penegak peraturan daerah (Perda) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara. Selain itu, juga dilibatkan Dinas Perhubungan Kaltara serta Gabungan Partai Politik selaku peserta pemilu serta bakal calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara.

“Pembicaraan itu berkaitan den-

gan aturan main dalam kampanye, apa yang diperbolehkan dan yang dilanggar,” ucap pimpinan Bawaslu Kaltara, Sulaiman yang merupakan koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, beberapa waktu lalu.

Ia mengingatkan kepada partai politik sebagai peserta pemilu dan bakal calon anggota DPD Provinsi Kaltara, supaya tetap berjalan dalam koridor regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sulaiman menuturkan, setiap partai politik atau calon DPD Kaltara bisa saja melakukan sosialisasi dengan memasang bendera partai politik. Rapat atau pertemuan terbatas, asal tetap mematuhi apa yang telah diamanatkan sesuai pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

“Definisi kampanye unsurnya tidak bersifat akumulatif lagi, saat ini sudah bersifat alternatif,” ujar Sulaiman.

Sehingga, kata dia jika dalam pengertian definisi yang sudah ditetapkan dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa

kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri Peserta Pemilu.

“Walaupun, hanya memuat salah satu dari unsur visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu sudah dapat dikategorikan kampanye,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltara Suryanata al-Islami, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu Kaltara. Ia mengatakan kegiatan seperti ini harus dapat dilaksanakan terus dengan memperhatikan Bawaslu, KPU, dan Peserta Pemilu baik Parpol maupun Bakal Calon Anggota DPD bersama stakeholder terkait.

“Hal itu dimaksudkan guna mencairkan komunikasi antara penyelenggara dan peserta Pemilu, sehingga jika ada permasalahan dapat diskusikan bersama dan mencari jalan keluar yang terbaik,” singkatnya. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat membenarkan tersangka Hamsi memenuhi panggilan.

Tersangka Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah untuk Pengolahan Limbah B3 Penuhi Panggilan Polda Kaltara

TANJUNG SELOR - Pemanggilan kedua terhadap tersangka eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Samsi dijadwalkan pada, Selasa (22/8/2023) kemarin.

Mekanisme pemanggilan kedua, lantaran pemanggilan pertama tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Dikonfirmasi mengenai pemanggilan tersebut, Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat membenarkan.

Dia menuturkan, untuk jadwal pemanggilan tidak ada perubahan artinya tetap sesuai jadwal. Pada akhirnya, yang bersangkutan memenuhi pemanggilan kedua dengan mendatangi Mapolda Kaltara yang berlokasi di KM 9 Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor.

"Alhamdulillah, beliau sudah datang memenuhi panggilan penyidik Polda Kaltara," ungkapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat

kat WhatsApp pribadinya, Rabu (23/8/2023).

Mengenai waktu pemeriksaan, kata Kombes Budi itu masuk dalam ranah privasi pemeriksaan oleh tim penyidik dan berdasarkan aturan.

"Detailnya masuk ranah privat ya, sesuai UU. Kalau sudah lengkap tentunya akan kami sampaikan," singkatnya.

Diketahui, kedatangan eks Kadis DLH ke Mapolda Kaltara turut diampungi oleh Penasihat Hukum (PH) Muklis Ramlan. Media ini berupaya untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada Penasihat Hukumnya, mengenai perkara yang tengah dijalankan oleh kliennya.

Namun, yang bersangkutan menerangkan kliennya tidak berkenan untuk konferensi pers. "Yang bersangkutan tidak mau konferensi pers," singkat Muklis Ramlan.

Diwartakan sebelumnya, tersangka

mantan Kadis DLH Kaltara, Samsi diduga telah melakukan penyelewengan dana hibah untuk pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah Kaltara.

Nominal anggaran tersebut mencapai miliaran rupiah, namun untuk yang dilakukan penyelewengan belum diketahui persis, karena tengah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Kaltara.

Tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pertama kali pada 14 Agustus 2023 lalu. Ia mangkir, sehingga pada 22 Agustus 2023 dilanjutkan dengan pemanggilan kedua, dan yang bersangkutan berkenan hadir. Namun, kedatangan yang bersangkutan berhasil lolos dari potret awak media. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



Gubernur Kaltara Sambangi Lokasi Kebakaran dan Berikan Bantuan kepada Korban

TARAKAN — Disela kegiatannya, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum sambangi lokasi kebakaran di Selumit Pantai, Kota Tarakan pada, Selasa (22/8/2023) sore.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Zainal menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada korban kebakaran.

“Saya menyampaikan turut belasungkawa atas kejadian ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian,” tutur Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Sebagai komitmen kehadiran Pemprov Kaltara, Gubernur juga memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang menelan beberapa rumah.

Gubernur juga mengajak semua

pihak agar bersama-sama turut berpartisipasi menaruh perhatian terhadap insiden kebakaran.

Diketahui kebakaran terjadi pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Kebakaran ini merupakan kali kedua kebakaran yang terjadi setelah sebelumnya juga terjadi kebakaran pada 6 Agustus 2023 lalu. (dkisp)



Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Resmikan Kelas Jauh SMAN 2 Tarakan di Tanjung Pasir

TARAKAN — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. resmikan kelas filial atau kelas jarak jauh SMAN 2 Tarakan di Tanjung Pasir Kota Tarakan pada Selasa (22/8/2023) malam.

Momen kebahagiaan ini disambut meriah oleh siswa-siswi kelas filial dan masyarakat Tanjung Pasir. Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Kaltara mengapresiasi dan menyambut positif kelas filial ini.

“Saya bersyukur dan berterimakasih karena Kita sadari bersama bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan suatu bangsa,” ungkap Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dalam sambutannya.

Peresmian sekolah filial ini merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terlebih di daerah yang sulit dijangkau.

“Kami berharap anak-anak di Kaltara, khususnya di Tanjung Pasir akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengembangkan diri. Dan melalui pendidikan yang baik, mereka akan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang,” imbuh Gubernur Zainal.

Tak lupanya, Gubernur Zainal juga mengajak orang tua, guru, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung perkembangan pendidikan di daerah Tanjung Pasir.

“Mari kita jadikan sekolah filial ini sebagai tempat yang mendorong semangat belajar dan membentuk karakter yang tangguh pada anak-anak kita,” pungkas Gubernur sebelum menandatangani plakat tanda peresmian.

Selanjutnya Gubernur menandatangani plakat peresmian kelas jauh SMAN 2 Tarakan di Tanjung Pasir.

Tampak hadir dalam peresmian kelas jauh ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kaltara Kota Tarakan Mustari, S.Pd., perwakilan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Plt. Camat Tarakan Timur, Basriadi, S.STP., serta Lurah Mamburungan, Yudhi, S.H. (*dkisp*)





Gubernur Melepas Kontingen Pelajar Kaltara Menuju POPNAS XVI Palembang

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi melepas kontingen Kaltara untuk berangkat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) ke-XVI di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang menyampaikan dukungan sebesar-besarnya serta merasa bangga atas dikirimnya atlet muda Kaltara pada POPNAS XVI di Palembang mulai 26 Agustus hingga 4 September 2023 mendatang.

"Provinsi Kaltara akan mengirimkan 34 Atlet pada 11 cabang olahraga. Saya mengucapkan selamat bertanding dan selamat berjuang untuk membawa nama baik pribadi provinsi tercinta," ucap Gubernur Zainal dalam sambutannya di Aula SMAN 1 Tarakan pada, Selasa (22/8/2023) sore.

Gubernur menyampaikan bahwa

POPNAS merupakan wadah mencari bibit atlet terbaik dari seluruh penjuru tanah air dan sebagai media evaluasi dari hasil pembinaan prestasi olahraga.

"Saya berharap para Atlet muda Kaltara sungguh-sungguh mengikuti pertandingan POPNAS ini, sehingga bukan tidak mungkin kelak kalian akan mengikuti pertandingan tingkat internasional," imbuh Zainal.

Seperti layaknya orang tua kepada anaknya, Gubernur berpesan agar para atlet tetap menjunjung tinggi sportivitas dan bertanding dengan penuh semangat.

"Jaga selalu kejujuran. Apapun hasilnya Kami sangat bangga dengan perjuangan Kalian dengan menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Karena juara sejati bukanlah orang yang berbuat curang untuk mendapat kemenangan," lanjut Gubernur.

Sebelum melepas kontingen, Gubernur Zainal tak lupa berpesan agar

kontingen Kaltara menjadi duta untuk mempromosikan keanekaragaman budaya dan keunggulan Kaltara serta budaya Benuanta yang ramah, sopan, jujur, dan bermental juara.

"Jangan menyerah sebelum wasit meniup peluit akhir pertandingan," tutup Gubernur Zainal dan dilanjutkan dengan pelepasan kontingen secara resmi.

Selain pelepasan kontingen oleh Gubernur, BPJS Ketenagakerjaan Kaltara juga memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh kontingen Kaltara pada POPNAS XVI secara simbolis.

Nampak hadir dalam pelepasan kali ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kaltara, juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara, H. M. Nasir, S.E. (dkisp)



Ilustrasi gangguan jaringan listrik

Listrik Sering Padam di Berau, PLN Sebut Banyak Gangguan Jaringan

TANJUNG REDEB - Pemadaman listrik kembali terjadi selama beberapa hari terakhir. Hal itu pun membuat masyarakat kesal.

Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Berau, Akhlis menuturkan, pemadaman listrik yang terjadi diakibatkan adanya gangguan sistem.

“Tetapi saat ini petugas di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap jaringan-jaringan listrik yang ada,” katanya, Rabu (23/8/2023).

Dia menerangkan, gangguan ja-

ringan saat ini ditemukan di jalur arah PLTU Teluk hingga Express PLTD Sambaliung. “Namun gangguan tersebut sudah berhasil diatasi tim di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, pemadaman listrik juga terjadi akibat adanya proses perbaikan tiang milik PLN. “Tetapi semoga besok tidak ada lagi pemadaman listrik yang terjadi,” imbuhnya.

Sementara, salah seorang masyarakat, Liana mengaku kesal dengan pemadaman listrik yang terjadi. Sebab, dirinya mengaku sangat

membutuhkan untuk pekerjaannya.

“Kalau matinya dari pagi terus, kita sulit untuk melakukan aktivitas. Semoga kedepan tidak ada lagi pemadaman listrik,” ujarnya.

Ia menyebut, akibat listrik padam itu jaringan internet juga terganggu. Pasalnya, tower provider yang ada turut padam. “Saya harap ada solusi, karena setiap pemadaman selama 4 jam kita tidak tahu mau berbuat apa,” tandasnya. (dez)

Koran DIGITAL

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

点火投产仪



SEMEN

'SINGA MERAH'

DARI KALTIM

HARAPAN BARU PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA
BACA HALAMAN 2-3





Semen 'Singa Merah' dari Kaltim

Harapan Baru Pembangunan IKN Nusantara

KALIORANG - Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kini menjadi pusat produksi semen yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

PT Kobexindo Cement, yang berlokasi di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, telah memulai produksi semen kering baru dengan kapasitas mencapai 8 juta ton per tahun.

Gubernur Kaltim, Isran Noor, me-

ngungkapkan keyakinannya bahwa produksi semen ini akan memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.

"Semen dari PT Kobexindo Cement ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di IKN," ujarnya saat meresmikan produksi tahap pertama perusahaan semen tersebut.

Produksi tahap pertama ini sendiri mencapai 4 juta ton per tahun. Semen

dengan merek "Singa Merah" ini menjadi semen pertama yang diproduksi di Provinsi Kaltim. Keberadaannya tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi semen di Indonesia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memicu pertumbuhan peluang usaha, khususnya bagi UMKM setempat.

Gubernur Isran Noor juga menekankan keterbukaan Provinsi Kaltim dalam menerima investasi di berbagai bidang, termasuk industri semen.



"Kami sangat mengharapkan Hongshi Holding Group untuk berinvestasi lebih lanjut di industri lain, seperti industri silikon," tambahnya.

Investasi ini dianggap penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dengan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Wakil Ketua sekaligus Wakil Gener-

al Manager Hongshi Holding Group, Guo Qizheng, menyatakan bahwa PT Kobexindo Cement adalah investasi kedua Hongshi di Indonesia, khususnya di Kutai Timur. Total investasi untuk proyek ini mencapai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15,3 triliun.

"Kami akan membangun lini produksi semen dengan kapasitas tahunan 8 juta ton dalam dua tahap,

serta dermaga pelabuhan dengan kapasitas berlabuh maksimum 60 ribu ton," ungkapnya.

Dengan peralatan modern, teknologi terdepan, dan komitmen perlindungan lingkungan kelas utama, proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru industri semen di Indonesia. (MK)

Editor: Agus Susanto

**JALAN SANTAI
DALAM RANGKA
GRAND OPENING GEDUNG NASIONAL**

**JAM 06.00-SELESAI
MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023**

GEDUNG NASIONAL SAMARINDA
Jl. Panglima Batur No.118, Pelabuhan

GUEST STAR: KATUJU, ZIN LIA, ZIN WENI

SPONSORED BY: ima, KATUJU, Sinar Dunia

MEDIA PARTNER: KATUJU, Sinar Dunia

ORGANIZED BY: Sinar Dunia

SUPPORTED BY: fplus



PRIVATE SALE ANGGOTA



Dapatkan diskon 25% pada liburan Anda berikutnya di Asia Pasifik. Anggota Accor Plus menikmati diskon tambahan 10%. Pesan sebelum 21 Agustus untuk menginap hingga 30 November 2023.

*Menginap minimal 2 malam. Syarat & ketentuan berlaku.





Gubernur Melepas Kontingen Pelajar Kaltara Menuju POPNAS XVI Palembang

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltra), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi melepas kontingen Kaltara untuk berajang pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) ke-XVI di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang menyampaikan dukungan sebesar-besarnya serta merasa bangga atas dikirimnya atlet muda Kaltara pada POPNAS XVI di Palembang mulai 26 Agustus hingga 4 September 2023 mendatang.

"Provinsi Kaltara akan mengirim 34 Atlet pada 11 cabang olahraga. Saya mengucapkan selamat bertanding dan selamat berjuang untuk membawa nama baik pribadi provinsi tercinta," ucap Gubernur Zainal dalam sambutannya di Aula SMAN 1 Tarakan pada, Selasa (22/8/2023) sore.

Gubernur menyampaikan bahwa

POPNAS merupakan wadah mencari bibit atlet terbaik dari seluruh penjuru tanah air dan sebagai media evaluasi dari hasil pembinaan prestasi olahraga.

"Saya berharap para Atlet muda Kaltara sungguh-sungguh mengikuti pertandingan POPNAS ini, sehingga bukan tidak mungkin kelak kalian akan mengikuti pertandingan tingkat internasional," imbuh Zainal.

Seperti layaknya orang tua kepada anaknya, Gubernur berpesan agar para atlet tetap menjunjung tinggi sportivitas dan bertanding dengan penuh semangat.

"Jaga selalu kejujuran. Apapun hasilnya Kami sangat bangga dengan perjuangan Kalian dengan menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Karena juara sejati bukanlah orang yang berbuat curang untuk mendapat kemenangan," lanjut Gubernur.

Sebelum melepas kontingen, Gu-

bernur Zainal tak lupa berpesan agar kontingen Kaltara menjadi duta untuk mempromosikan keanekaragaman budaya dan keunggulan Kaltara serta budaya Benuanta yang ramah, sopan, jujur, dan bermental juara. "Jangan menyerah sebelum wasit meniup peluit akhir pertandingan," tutup Gubernur Zainal dan dilanjutkan dengan pelepasan kontingen secara resmi.

Selain pelepasan kontingen oleh Gubernur, BPJS Ketenagakerjaan Kaltara juga memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh kontingen Kaltara pada POPNAS XVI secara simbolis.

Nampak hadir dalam pelepasan kali ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kaltara, juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara, H. M. Nasir, S.E. (dkisp)



Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Resmikan Kelas Jauh SMAN 2 Tarakan di Tanjung Pasir

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. resmikan kelas filial atau kelas jarak jauh SMAN 2 Tarakan di Tanjung Pasir Kota Tarakan pada Selasa (22/8/2023) malam.

Momen kebahagiaan ini disambut meriah oleh siswa-siswi kelas filial dan masyarakat Tanjung Pasir. Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Kaltara mengapresiasi dan menyambut positif kelas filial ini.

“Saya bersyukur dan berterimakasih karena Kita sadari bersama bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan suatu bangsa,” ungkap Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dalam sambutannya.

Peresmian sekolah filial ini merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terlebih di daerah yang sulit dijangkau.

“Kami berharap anak-anak di Kaltara, khususnya di Tanjung Pasir akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengembangkan diri. Dan melalui pendidikan yang baik, mereka akan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang,” imbuh Gubernur Zainal.

Tak lupanya, Gubernur Zainal juga mengajak orang tua, guru, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung perkembangan pendidikan di daerah Tanjung Pasir.

“Mari kita jadikan sekolah filial ini sebagai tempat yang mendorong semangat belajar dan membentuk karakter yang tangguh pada anak-anak kita,” pungkas Gubernur sebelum menandatangani plakat tanda peresmian.

Selanjutnya Gubernur menandatangani plakat peresmian kelas jauh SMAN 2 Tarakan di Tanjung Pasir.

Tampak hadir dalam peresmian kelas jauh ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kaltara Kota Tarakan Mustari, S.Pd., perwakilan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Plt. Camat Tarakan Timur, Basriadi, S.STP., serta Lurah Mamburungan, Yudhi, S.H. (**dkisp**)





Gubernur Kaltara Sambangi Lokasi Kebakaran dan Berikan Bantuan kepada Korban

TARAKAN – Disela kegiatannya, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum sambangi lokasi kebakaran di Selumit Pantai, Kota Tarakan pada, Selasa (22/8/2023) sore.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Zainal menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada korban kebakaran.

“Saya menyampaikan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian,” tutur Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Sebagai komitmen kehadiran Pemprov Kaltara, Gubernur juga memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang menelan beberapa rumah.

Gubernur juga mengajak semua

pihak agar bersama-sama turut berpartisipasi menaruh perhatian terhadap insiden kebakaran.

Diketahui kebakaran terjadi pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Kebakaran ini merupakan kali kedua kebakaran yang terjadi setelah sebelumnya juga terjadi kebakaran pada 6 Agustus 2023 lalu. (dkisp)

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim | mediakaltimdotcom | mediakaltim.com | media kaltim



Gubernur Kaltara Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi dan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi

TANJUNG SELOR- Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltara. Acara tersebut digelar di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Selasa (22/8/2023). Rakor ini dihadiri oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.

Rapat tersebut melibatkan kepala daerah dari berbagai wilayah di Provinsi Kaltara. Acara ini turut dirangkai dengan acara Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Paksi)/Ahli Pembangun Integritas (API) Provinsi Kaltara, serta Pembukaan dan Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Pemenuhan Data Pendukung Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2023 se-Kaltara.

Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, Gubernur Kaltara mengucapkan selamat datang di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kaltara kepada Bapak Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan KPK RI, beserta jajaran atas perhatian serta dukungannya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh daerah.

"Kami jajaran Pemprov Kaltara dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kaltara mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan perhatian dan dorongan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, memegang teguh integritas, meningkatkan transparan dan akuntabel, serta mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik," ujar Gubernur Zainal Paliwang.

Gubernur Zainal menyoroti hubungan erat antara pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan pembangunan. Ia menekankan pentingnya memperbaiki sistem pengendalian dan pencegahan secara terus-menerus guna mencegah potensi penyimpangan dan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Zainal mengungkapkan berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan oleh Pemprov Kaltara. Ini termasuk Mou integritas untuk pemberantasan korupsi. Lalu, penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi pemerintah daerah se-Provinsi Kaltara, pelaksanaan survei penilaian integritas terhadap pelayanan publik yang di supervisi oleh KPK secara independen, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov Kaltara dengan Kajati dan Kapolda dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Selain itu, ada juga MoU penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemprov Kaltara dan kejaksaan

tinggi Kalimantan Timur (Kaltim), Optimalisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dan perjanjian kerja sama dalam rangka pengamanan aset khususnya tanah Pemda yang difasilitasi oleh KPK.

Tak hanya itu, Zainal juga menyampaikan beberapa upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kaltara yang disupervisi oleh KPK.

Pertama, program pencegahan korupsi terintegrasi yang merupakan bagian dan peran KPK dalam mengkoordinasi dan memonitoring upaya-upaya pencegahan korupsi.

Implementasi pencegahan korupsi terintegrasi ini, bahkan telah melalui tahap identifikasi titik rawan korupsi, penandatanganan komitmen, penetapan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dan monitoring evaluasi capaian aksi melalui portal (jaga.id) KPK secara berkala.

Dimana hal tersebut berfokus pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah pada 8 area intervensi. Antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Perizinan, Kapabilitas APiP, Manaje-

men ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Alhasil, capaian pemenuhan rencana aksi nasional Korsupgah KPK Provinsi Kaltara tahun 2022 sebesar 86 persen dan berada pada 'Zona Hijau'.

Gubernur menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, selaku Ketua dan Penanggungjawab Pelaksana Rencana Aksi Korsupgah KPK dan seluruh kepala OPD pengampu area intervensi agar terus meningkatkan kinerja dan capaian pemenuhan indikator rencana aksi nasional Provinsi Kaltara sampai akhir tahun 2023.

"Demikian pula kepada Bupati/Walikota se-Kaltara, saya mengingatkan untuk segera melakukan tindak lanjut peningkatan capaian indikator pemenuhan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 ini," imbuhnya.

Kedua, lanjut Gubernur, adalah program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) pada Pemprov Kaltara dengan aksi perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan mendorong fasilitas pelayanan kesehatan provinsi melalui sistem pencatatan rekam medis elektronik dan terintegrasi dalam platform "satusehat", serta penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang

melalui pendekatan kebijakan satu peta.

Ketiga, monitoring kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dimana, LHKPN Pemprov Kaltara per 31 maret 2023, untuk ASN telah dilaksanakan 100 persen.

Keempat, Provinsi Kaltara pada tahun 2023 sedang melaksanakan pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) secara nasional atas pelayanan publik yang diberikan. Dan kelima, dalam mendukung KPK RI dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan, saat ini Pemprov melalui BPSDM, Inspektorat dan Dinas Pendidikan aktif dalam mengikuti program sertifikasi penyuluh antikorupsi bersama KPK.

Kompetensi penyuluh antikorupsi ini diharapkan dapat memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang budaya antikorupsi, sehingga masyarakat semakin bertambah wawasannya dan dapat mengawasi jalannya program pemerintahan dengan lebih baik, efektif, bebas dari perilaku korupsi.

"Semua upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya antikorupsi dan mengawasi jalannya program pemerintahan dengan lebih efektif dan bebas dari perilaku korupsi," tutup Gubernur Kaltara. (dkisp)





YAHYA/ISTIMEWA/MEDIA KALTIM

Pelaksanaan seminar stunting dari IBI Bontang.

Pemkot Bontang Apresiasi Langkah IBI Cegah Stunting

BONTANG - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bontang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 tahun 2023. Pada peringatan HUT Ke-72 IBI tahun ini mengambil tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan menggelar seminar upaya penurunan dan pencegahan stunting dengan menyasar calon pengantin di Kota Bontang pada Minggu (20/8/2023) di pendopo rumah jabatan wali Kota Bontang.

Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lukman mengatakan apresiasinya atas langkah IBI Bontang dalam meningkatkan kesadaran mengenai masalah stunting dan peran penting bidan dalam pencegahan

stunting. Dengan perayaan HUT IBI ini dapat menyamakan program-program kegiatan yang dilakukan IBI dan Pemkot Bontang.

"Melalui perayaan HUT ini mari kita satukan langkah dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kota dan IBI. Mari kita bekerja sama untuk memperkuat pelayanan kebidanan berkesinambungan yang bermutu tinggi dan berfokus pada upaya pencegahan, promosi, dan pemulihan kesehatan ibu dan anak, dengan begitu kita dapat menciptakan masyarakat kota Bontang yang sehat," jelas Lukman perayaan HUT IBI ke-72.

Selanjutnya, Lukman mengatakan peran bidan sangat dibutuhkan dan penting dalam pemberian edukasi bagi masyarakat serta calon pengantin. Selain memberikan pengetahuan

mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan sejak awal kehamilan.

"Pentingnya peran bidan dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan stunting," ungkapnya.

Lukman juga mengatakan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting terutama bagi kalangan calon pengantin.

"Seminar ini diharapkan dapat membantu mencegah masalah stunting pada anak-anak di masa depan," tutupnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



SYAKURAH

Kunjungan lapangan Wali Kota Bontang, Basri Rase ke SDN 007 BU.

Keluhan Sekolah Diterima, Pemkot Alokasikan Anggaran Relokasi SDN 007 Guntung

BONTANG – Pemkot Bontang bakal menyiapkan anggaran untuk relokasi bangunan SDN 007 di Kelurahan Guntung. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bontang, Basri Rase saat meninjau langsung sarana dan prasarana (sapas) SDN 007 Guntung, Rabu (23/8/23)

Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah berterima kasih kepada Pemkot Bontang yang telah merespon proposal yang diajukan. Respon tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Sekda dan Wali Kota Bontang melihat langsung kondisi sekolah lokasi kemarin dan hari ini.

Kepala sekolah SDN 007 Bontang Utara, Nurmiani menjelaskan, beberapa fasilitas utama yang kurang yakni toilet. SDN 007 BU memiliki total 589 peserta didik dan 31 tenaga pengajar, namun toilet yang tersedia hanya 6 saja.

“Untuk idealnya, setidaknya kita

memiliki 17 toilet untuk peserta didik sebanyak itu,” terangnya.

Terdapat juga toilet yang ada septi tanknya, namun aliran limbahnya tidak ada, sehingga ketika merembes biasanya ada ular. Pembuatan aliran limbah juga bermasalah karena sudah serba mepet dengan pemukiman.

Selain itu, aroma amoniak juga kerap tercium selama proses mengajar, sehingga menyebabkan beberapa siswa mengeluh tidak bisa bernafas dan lain sebagainya.

Ruang kelas yang juga terbatas membuat pengajaran dijadikan 2 shif, yakni pagi dan siang.

“Karena lapangan kecil, biasanya siswa yang upacara hanya kelas 4,5, dan 6. Itupun mereka tidak mengenal lencang depan, karena kalau mereka lencang depan tidak akan cukup,” tambahnya.

Wilayah tersebut juga dapat ter-

genang air jika hujan lebih dari 10 menit, bahkan saat dilihat di lokasi sudah terdapat air menggenang karena diguyur hujan pada pagi hari.

Wali Kota Bontang, Basri Rase yang melihat langsung kondisi sapras sekolah tersebut menyatakan, kurang layaknya fasilitas di sana sehingga akan ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran terkait lokasi, serta dana pembangunan sekolah dengan dinas pendidikan.

“Seharusnya SD ini bisa menjadi sekolah terpadu, sehat dan hijau, termasuk WC, kantin, perpustakaan, dan UKS. Sekali membangun harus yang berjangka panjang, karena kita menyikapi masyarakat yang tentu makin banyak,” tegasnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



YAHYA/MEDIA KALTIM

Peserta saat sedang bertanding catur di Kelurahan Loktuan, Selasa malam.

Turnamen Catur Se-Kota Bontang, Upaya Cetak Bibit Atlet

BONTANG – Pembukaan Gelaran Turnamen Catur Se-Kota Bontang dilaksanakan pada Selasa (22/8/2023) malam bertempat di halaman kantor Kelurahan Loktuan. Turnamen catur dilaksanakan atas kerja sama Kelurahan Loktuan dan PT KPI.

Lurah Loktuan, Hadi Jumianto mengatakan turnamen catur telah dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan agar melahirkan atlet catur Kota Bontang yang dapat mewakili Kota Bontang dalam event nasional atau internasional.

“Ini berkat kerja sama mitra Kelurahan Loktuan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar agar tujuannya dapat menghasilkan bibit atlet catur Kota Bontang yang dapat mewakili di ajang atau event nasional dan internasional,” kata Hadi Jumianto.

Sementara, Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Dedy Haryanto mengatakan kegiatan dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini memiliki makna yang sangat mendalam.

Selain sebagai momen untuk merayakan kemerdekaan juga merupakan momentum untuk terus menggali potensi dan bakat-bakat unggul di tengah-tengah masyarakat. Lomba

catur se-Kota Bontang menjadi salah satu wadah yang sangat tepat untuk menggali bibit-bibit atlet catur berbakat di Kota Bontang.

“Selain menjadi ajang untuk memererat tali silaturahmi antar peserta. Permainan catur, setiap langkah memiliki makna strategis. Begitu pula dalam membangun kota ini, setiap langkah kita harus dijalankan dengan perencanaan yang matang dan kerja keras. Dengan semangat yang sama, mari kita terus bekerja bersama untuk menghadirkan perubahan yang positif bagi kota kita tercinta,” terang Dedy.

Dedy menambahkan bahwa untuk itu mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan etika bermain yang baik sehingga kompetisi dapat berjalan dengan lancar dan penuh keceriaan.

“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk merayakan keberagaman dan keunikan budaya bangsa kita. Dengan semangat bhinneka tunggal ika, kita tunjukkan bahwa Kota Bontang adalah kota yang masyarakatnya damai dan beradab,” imbuhnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari





YUSVA ALAM

Desa Wisata Malahing di malam hari.

Yuk Dukung Malahing Jadi Desa Wisata Favorit ADWI 2023! Begini Caranya

BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang meminta dukungan seluruh masyarakat Bontang agar Desa Wisata Malahing dapat menjadi juara favorit dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023.

Diketahui, Malahing telah menjadi salah satu nominasi desa wisata dalam ADWI Tahun 2023 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Kampung di atas

laut ini masuk nominasi di antara 75 desa wisata seluruh Indonesia.

Mengutip dari Instagram Dispopar Bontang, dukungan kepada Desa Malahing berupa vote video Malahing dengan cara like, comment, dan subscribe di channel youtube Kemenparekraf RI dengan klik link di bawah ini:

https://www.youtube.com/watch?v=vzOF9ja13nY&ab_channel=Kemenparekraf

Kadispopar, Ahmad Aznem mengatakan, batas waktu memberikan vote video Malahing dimulai 21 – 25 Agustus 2023. Karenanya dia memohon dukungan seluruh warga Bontang untuk memberikan dukungan.

“Dengan dukungan kita semua, semoga Desa Wisata Malahing bisa mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia terfavorit,” harapnya. (adv/al)



Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono sebut pengerjaan proyek pembangunan sekolah terpadu di Perumahan Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan tidak akan sesuai target.

Progres Pembangunan Sekolah Terpadu di Balikpapan Regency Tak Sesuai Target

BALIKPAPAN - Progres pengerjaan proyek pembangunan sekolah terpadu di Perumahan Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan tidak akan sesuai target. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono usai melihat langsung progres di lapangan proyek pembangunan SMP Terpadu Balikpapan tersebut.

"Berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, pengerjaan proyek sekolah tersebut dinilai tidak sesuai dengan pencapaian pekerjaan yang ada di lapangan," ujarnya Rabu (23/8/2023).

Budiono menjelaskan, bahwa apa yang dipaparkan oleh PT Sarjis selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan bahwa progres pekerjaan di lapangan sudah mencapai

38 persen lebih tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Berdasarkan masukan yang disampaikan konsultan bahwa pembangunan 38 sekian persen tersebut, ternyata tidak sesuai di lapangan. Konsultan juga menyampaikan bahwa angkanya tidak setinggi itu dan konsultan juga sudah memberikan langkah-langkah peringatan kepada PT Sarjis yang tidak mencapai target yang ditentukan," jelasnya.

Budiono juga menambahkan, setelah bertemu dengan para pekerja proyek yang ada di sana bahwa pekerja juga tidak diberikan upah selayaknya.

"Sehingga kami lihat mereka para pekerja hanya duduk-duduk saja. Kata para pekerja mereka menung-

gu material. Dan ini kendala lagi, ternyata pemborong atau PT Sarjis ini juga tidak mempunyai dana yang kuat sehingga material terkendala," tambah Budiono.

Selanjutnya, konsultan juga sudah memberikan rekomendasi dengan sisa waktu 4 bulan hingga Desember 2023 mendatang.

"Nyaris pola kerja begitu kemudian pendanaannya tidak kuat. Saya tidak yakin itu akan selesai. Dan rekomendasi konsultan di PT Sarjis segera dilakukan evaluasi dan pemutusan kontrak kerja," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

Taufik Sebut Pajak THM Diduga Alami Kebocoran

BALIKPAPAN- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak tempat hiburan malam (THM) di Kota Balikpapan diduga banyak mengalami kebocoran. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman. Bahwa beberapa tempat hiburan ditemukan banyak pendomplengan pajak daerah.

"Berapa waktu yang lalu kami dari Komisi II diajak oleh Bapemperda ditemukan adanya tempat-tempat hiburan malam itu yang melakukan pendomplengan pajak. Banyak sekali permainannya, terutama tempat hiburan buka dulu baru izinnya dijalankan," ujarnya Rabu (23/8/2023).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, berdasarkan hasil sidak terdapat beberapa temuan seperti Tapping Box atau alat perekam dan monitoring pajak yang sudah disediakan oleh Dispenda ditemukan tidak aktif. Hal ini juga sempat ditanyakan kepada kasir THM, namun ketika dikonfirmasi kepada pihak pengelola itu tidak bisa menjawab.

"Padahal jelas ada buktinya, temuan pembayaran di kasir. Jadi berapa kerugian pendapatan daerah dalam sehari?," jelasnya.

Dengan adanya kejadian ini, Taufik menduga ada permainan oknum Dispenda di lapangan atau juga mungkin Dispenda kekurangan tenaga untuk pengawasan di lapangan. Dengan kondisi ini, bisa dihitung berapa kerugian daerah yang diterima oleh Kota Balikpapan dari kebocoran PAD dari sektor pajak THM.

"Itu kemana pajaknya selama ini. Ini tidak pernah ditindak tegas, ataupun dilakukan penutupan terhadap THM. Ini ada apa dengan pemerintah kota?," tegasnya.

Dan saat ini juga banyak dari pengusaha tempat hiburan malam yang mengajukan keberatan dengan besaran pajak sebesar 60 persen yang diterapkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Namun yang menjadi per-

soalan adalah banyak pengusaha dari tempat hiburan yang kemudian tidak jujur dalam perhitungan penyetoran pajaknya kepada daerah. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman

10
09
2023

REUNI
SMK PERTIWI
Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize

Only
Rp. 50k

Konfirmasi kehadiran : Masnah 081252119669



ISTIMEWA

Pelabuhan Loktuan saat kapal sandar.

Macet Saat Kapal Sandar di Pelabuhan Loktuan Dikeluhkan Anggota Dewan

BONTANG – Mewakili warga Selambai, Kelurahan Loktuan dan sekitarnya, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mengeluhkan kondisi macet di Pelabuhan Loktuan saat kapal bersandar kepada Wali Kota Bontang.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Diungkapkan Politisi dari Partai Nasdem ini, setiap ada kapal bersandar di Pelabuhan Loktuan, maka

kondisi macet tidak terelakkan. Lantaran lalu lintas penjemput penumpang maupun penumpang kapal itu sendiri yang berlalu lalang di pelabuhan menimbulkan kemacetan.

Aktivitas kemacetan di jalanan menuju pelabuhan dikatakannya luar biasa macet. Sehingga membuat warga sekitar pelabuhan terganggu.

“Setiap ada kapal kami merasa terganggu. Warga sekitar kesulitan keluar masuk wilayahnya. Bahkan toko-toko di pinggir jalan pun terimbas,” keluh Faisal.

Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut dengan men-

gatakan, pihaknya akan berusaha melakukan pembebasan lahan di sekitar pelabuhan. Hal itu menjadi solusi kemacetan yang terjadi saat kapal bersandar.

“Parkiran pelabuhan di perubahan ini kami akan lakukan appraisal pembebasan lahan. Ada beberapa yang akan kita appraisal untuk pembebasan lahan di pelabuhan. Lainnya seperti perbaikan folder, sekolah, pemakaman, dsb. Mudah-mudahan tahun depan bisa dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan semoga parkirannya semakin bagus,” jelas Basri. (adv/al)



IST

Perkembangan di pesisir Bontang.

Pendataan Warga Miskin Pesisir Tak Maksimal, Pemkot Terkendala Kewenangan

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyoroti pendataan warga miskin yang dirasa kurang maksimal. Khususnya pendataan warga miskin yang berada di kawasan pesisir Bontang.

Hal itu diungkapkannya saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, mengapa pendataan di kawasan pesisir dirasa kurang, lantaran masih banyaknya warga pesisir yang belum menda-

ptkan bantuan dari pemerintah.

“Pendataan warga di kampung-kampung pesisir tidak maksimal. Bantuan-bantuan pemerintah yang seharusnya bermanfaat buat masyarakat miskin belum terlalu dirasakan oleh warga pesisir,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota Bontang menanggapi sorotan tersebut, bahwa masalah kemiskinan selalu jadi perhatian bagi Pemkot Bontang. Namun begitu, pemkot menemui kendala terkait pendataan warga miskin ini. Lantaran data yang dipakai pemkot merupakan data dari Kementerian

Sosial RI.

“Masalahnya kita gak punya kewenangan untuk pendataan secara objektif dan riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kriteria kemiskinan ini juga terkadang menjadi permasalahan sendiri. Karena menurutnya masih banyak orang yang sebenarnya mampu namun mengaku miskin.

“Coba lihat di kantor pos kalau ada yang antri bantuan pakai hape, pakai motor, karena ingin dapatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya,” ucap Basri. (adv/al)



ISTIMEWA

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Fasilitasi Kegemaran Masyarakat, Ketua DPRD Kukar Dukung Lomba Layang-layang di Maluhu

TENGGARONG - Permainan tradisional layang-layang kini kembali digandrungi masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tak terkecuali di Kutai Kartanegara (Kukar). Layang-layang warna-warni mewarnai langit, seperti yang terjadi di Kelurahan Maluhu. Ini pun memikat perhatian Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, hingga menjadikannya lomba.

"Untuk meramaikan Dirgahayu RI, kebetulan sekarang ini momennya pas (musim layang-layang)," ujar Rasid, Rabu (23/8/2023).

Tidak main-main, lomba yang dipusatkan di Jalan Selimpat, Kelurahan Melayu, ini menyiapkan hadiah uang

tunai hingga jutaan rupiah. Dilaksanakan selama dua hari, yakni 26-27 Agustus 2023.

Dukungan yang ia berikan ini, dikatakan oleh Rasid, sebagai bentuk harapan agar permainan masa kecilnya ini, tidak termakan oleh waktu di tengah gempuran anak-anak hingga remaja yang lebih menyukai gadget.

"Saya hanya men-support, warga Maluhu yang selenggarakan. Jadi lombanya itu adu tegangan tali tiap peserta saat menerbangkannya ke langit," lanjutnya.

Memang adu layang-layang jadi permainan baru yang kini digandrungi. Ini pun dianggap jadi wadah yang

tepat, sehingga para anak-anak tidak bermain ditempat yang tidak seharusnya, di jalan raya salah satunya. Selain membahayakan pemainnya, juga pengguna jalan yang sering terlilit sisa-sisa tali layang-layang.

"Anak-anak, orang tua main layang-layang disitu. Menjadi hiburan masyarakat kita juga. Bahkan beberapa kali kami terputar tidak bisa lewat karena penuh sekali. Ini menjadi tempat wisata yang baru," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor: Nicha Ratnasari



Dialog Bersama Komisi II DPR RI, Abdul Rasid Harap Masukan Masyarakat Lokal Diterima

TENGGARONG - Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin langsung oleh Dolly Kurnia, disambut langsung Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, pada Selasa (22/8/2023) malam, di Hotel Platinum, Balikpapan.

Agenda berupa dialog ini, dilakukan pasca Komisi II DPR RI, melakukan kunjungan langsung ke Titik Nol IKN pada siang sebelumnya. Pada acara dialog itulah, menjadi kesempatan masyarakat Kaltim menyampaikan sejumlah pesan dan masukan. Seperti dukungan dan saran bagaimana pelaksanaan IKN ini harus melibatkan masyarakat lokal di Kaltim. Dan harus menjaga adat budaya di Kaltim.

"Tadi malam juga hadir Pangeran Poeger dari Kesultanan Kutai yang menyampaikan masalah bagaimana peninggalan Kesultanan di Kukar harus diperhatikan, termasuk juga dengan Kesultanan yang ada di Kaltim," ungkap Rasid.

Selain itu, Rasid pun sempat menyampaikan terkait status beberapa kecamatan yang masuk menjadi bagian dari IKN itu sendiri. Terlebih sudah mendekati waktu pemilu yang jatuh pada tahun 2024 mendatang. Status pemilih mereka nantinya pada 2024, apakah masuk wilayah pemilihan IKN atau tetap masuk wilayah Kukar.

Tak hanya itu, pembangunan IKN pun turut dibahas dalam pertemuan bersama wakil Senayan tersebut. Bagaimana kabupaten dan kota yang menjadi mitra maupun penyangga bisa ikut terlibat dan turut merasakan pembangunan. Dengan kata lain, kabupaten dan kota mitra dan penyangga memiliki rasa tanggung

jawab dalam mempercepat pembangunan IKN.

"Kita tidak tahu karena pembahasannya di Jakarta, mudah-mudahan apa yang disampaikan masyarakat kita bisa diakomodir," tutup Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor: Nicha Ratnasari





ISTIMEWA

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid (tengah), saat menanam pohon di Samboja Barat.

Ketua DPRD Kukar Hadiri Penanaman Bibit Pohon di Samboja Barat

TENGGARONG - Agenda ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Salah satu rangkaianannya melibatkan Polri dalam agenda penghijauan, dengan tema "Penhijauan Sejak Dini, Polri Lestarian Negeri", pada Rabu (23/8/2023).

Di Kalimantan Timur (Kaltim), dikomandoi langsung oleh Polda Kaltim. Terpusat di Kecamatan Samboja Barat. Turut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Jajaran Polda Kaltim, Polres Kukar, Camat Samboja Barat, tokoh masyarakat dan beberapa pihak terkait lainnya.

Abdul Rasid menjadi satu peserta yang ikut dalam kegiatan menanam

bibit pohon sejumlah 1.209 bibit pohon. Di antaranya, bibit Pohon Trembesi, Pohon Tanjung, Pohon Angsana, Pohon Jengkol, Pohon Kemiri, Pohon Meranti, Pohon Balangeran, dan Pohon Kapur. Bibit tanaman tersebut ditanam di dua lokasi, yakni Km 45 Kelurahan Bukit Merdeka dan Km 43 Kelurahan Sungai Merdeka.

"Kita menyambut baik apa yang dilaksanakan hari ini, karena dalam rangka menanam jutaan (bibit) pohon. Karena kita saat ini krisis penghijauan," ungkap Rasid, Rabu (23/8/2023).

Ia pun berharap, dengan adanya penghijauan yang terfokus di Samboja Barat ini, mampu mengembalikan kualitas udara di Kaltim di samping

beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa lokasi di Kaltim.

Ini pula dianggap sebagai langkah yang tepat, dalam memperbaiki kondisi lingkungan Kaltim saat ini, khususnya di Kukar. Langkah konkret untuk menghadirkan suasana yang sejuk menyegarkan udara, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor: Nicha Ratnasari



**DANDIM CUP
KEJURPROV
SERI 3
2023**

**BEST TIME
TROPHY
DAN UANG
PEMBINAAN**

**HADIAH
UTAMA
MOTOR
MATIC**



KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN

DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING

KETUA IMI KALTIM



**SAFETY
RIDING**



**LOMBA
DRAG BIKE**



**TALKSHOW
KEREN**



**LOMBA
MODERN DANCE**



**LIVE
MUSIC**



**LOMBA
17 AGUSTUS**



**LOMBA
FASHION SHOW**



**JALAN
SANTAI**



**KULINER
UMKM**

SAFETY RIDING & DRAG BIKE

**26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA**

JALAN SANTAI



**DOOR
PRIZE !!!**

Disney+ hotstar
NETFLIX



PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571



Petani sawit mandiri didorong memiliki STDB untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

ISPO Jadi Syarat Jual TBS pada 2025 Mendatang

TANJUNG REDEB - Dinas Perkebunan (Disbun) Berau mendorong para petani sawit mandiri di Kabupaten Berau memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk mendapatkan sertifikat Indonesian Palm Oil System (ISPO). Pasalnya pada 2025 mendatang, petani wajib memiliki ISPO agar dapat menjual Tandan Buah Segar (TBS).

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini menyebut, sejauh ini baru ada 129 petani sawit mandiri yang memiliki STDB. Targetnya, tahun ini pihaknya akan menerbitkan 500 STDB. Dalam kepengurusan itu pihaknya dibantu oleh berbagai NGO. Untuk mendampingi dan mendorong petani memiliki STDB.

"Karena masih banyak petani yang belum mau mengurus STDB," katanya, belum lama ini.

Pada 2025 mendatang pemerintah mewajibkan semua petani sawit harus memiliki sertifikat ISPO. Jika tidak, mereka tidak bisa menjual TBS. Makanya, Disbun Berau gencar untuk mendorong semua petani memiliki STDB.

"STDB menjadi persyaratan utama untuk mendapat ISPO. Di Berau

sendiri belum ada yang memiliki ISPO tapi kalau perusahaan semua sudah punya," tuturnya.

Kendalanya, kata Lita, banyak petani mandiri yang bermasalah dengan lahannya. Seperti, tidak memiliki surat kepemilikan lengkap dan ada beberapa yang lahannya termasuk dalam kawasan hutan. Ada juga yang sudah memiliki tanah tapi kepemilikan tanahnya belum diubah menjadi miliknya.

"Sehingga kami tidak bisa menerbitkan STDB. Tapi kami mencoba berkoordinasi dengan provinsi adakah terborosan yang bisa dicapai. Misal pakai surat keterangan kampung atau bagaimana," jelasnya.

Selain itu, yang menjadi kendala yakni hanya ada dua tenaga yang melakukan pemetaan. Sebab untuk memberikan STDB harus dipetakan titik koordinatnya agar lebih jelas berapa luas lahan sawit yang dimiliki.

"Tenaga kami hanya 2 orang saja untuk meneliti semua persyaratan. Makanya kami butuh bantuan pihak ketiga untuk membantu proses pemberian STDB itu," paparnya.

Lanjutnya, STDB juga sebagai

syarat untuk mendapatkan bantuan dari provinsi dan pusat. Memang diakui persyaratannya lebih banyak. Yang saat ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Alokasinya khusus untuk petani sawit mandiri yang harus memiliki kelompok dan STDB. Petani yang sudah punya STDB itulah yang diprioritaskan untuk dapat bantuan dari BPDPKS," ungkapnya.

Memang saat ini perkebunan masih menjadi prioritas pengembangan, karena menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Berau. Yang mana utamanya yakni komoditas sawit. Tapi pemerintah daerah menilai sawit sudah mampu mandiri. Makanya, Pemkab Berau tidak lagi memberikan bantuan pengembangan sawit.

"Sampai saat ini penerbitan PDRB masih berproses, mudah-mudahan target itu bisa tercapai," harapnya. **(mnz/dez)**

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan

Panitia Pilkakam Serentak di Berau Diminta Selektif

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu mengingatkan panitia pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak untuk selektif memeriksa berkas bakal calon kepala kampung. Pihaknya juga memastikan semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap kampung sudah terbentuk. Yang mana pada Oktober mendatang ada 53 kampung yang melakukan pilkakam serentak.

"Kebanyakan di setiap kampung ada satu TPS, namun ada juga yang lebih dari satu TPS, tergantung jumlah pemilihnya," ungkapnya, Rabu (23/8/2023).

Lanjutnya, dari proses persiapan yang pihaknya lakukan, salah satu yang paling penting adalah peran dari panitia pilkakam serentak. Pasalnya, panitia harus lebih jeli dan teliti serta selektif dalam pemeriksaan berkas bakal calon kepala kampung. "Pemberkasannya harus lebih teliti dan cermat diperiksa, pasalnya untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari," tegasnya.

Tentram berpesan kepada panitia Pilkakam serentak untuk memperhatikan, jika peserta bakal calon kepala kampung hanya satu calon, perlu diperpanjang waktu pendaftarannya. Namun, jika calon yang mendaftar lebih dari lima, akan ada ujian tertulis. "Kalau hanya satu calon kita perpanjang masa pendaftaran, namun lebih dari lima calon kita akan melaksanakan ujian tertulis," tegasnya.

Pihaknya juga telah melakukan rapat bersama pihak TNI/Polri untuk membahas tentang persiapan keamanan pada saat proses pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkakam Oktober mendatang. "Untuk menjaga kondusifitas, kami telah melakukan rapat bersama TNI/Polri," katanya.



Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu

Tentram berharap, 53 kampung yang melaksanakan Pilkakam serentak bisa berjalan lancar hingga pelaksanaan Pilkakam serentak berjalan hingga selesai. "Semoga persiapan kita matang dan tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi. Tentunya kita berharap Pilkakam ini bisa sukses yang melahirkan kepala kampung yang bisa memajukan kampung dan mensejahterakan masyarakatnya," harapnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Dezwan

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Singen Alam No. 224A, Bontang Cak, Bontang Berau
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

Listrik Sering Padam di Berau, PLN Sebut Banyak Gangguan Jaringan

TANJUNG REDEB - Pemadaman listrik kembali terjadi selama beberapa hari terakhir. Hal itu pun membuat masyarakat kesal. Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Berau, Akhlis menuturkan, pemadaman listrik yang terjadi diakibatkan adanya gangguan sistem.

"Tetapi saat ini petugas di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap jaringan-jaringan listrik yang ada," katanya, Rabu (23/8/2023).

Dia menerangkan, gangguan jaringan saat ini ditemukan di jalur arah PLTU Teluk hingga Express PLTD Sambaliung. "Namun gangguan tersebut sudah berhasil diatasi tim di lapangan," ujarnya.

Selain itu, pemadaman listrik juga terjadi akibat adanya proses perbaikan tiang milik PLN. "Tetapi semoga besok tidak ada lagi pemadaman listrik yang terjadi," imbuhnya.

Sementara, salah seorang mas-



yarakat, Liana mengaku kesal dengan pemadaman listrik yang terjadi. Sebab, dirinya mengaku sangat membutuhkan untuk pekerjaannya. "Kalau matinya dari pagi terus, kita sulit untuk melakukan aktivitas. Semoga kedepan tidak ada lagi pemadaman listrik," ujarnya.

Ia menyebut, akibat listrik padam itu jaringan internet juga terganggu. Peralannya, tower provider yang ada turut padam. "Saya harap ada solusi, karena setiap pemadaman selama 4 jam kita tidak tahu mau berbuat apa," tandasnya. (dez)

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Proses constatering di Jalan Merah Delima RT 37 Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan pemilik aset.

Ricuh, Proses Constatering di Jalan Merah Delima

BALIKPAPAN - Aksi saling dorong antara polisi dan warga terjadi di Jalan Merah Delima RT 37 Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan pada Rabu (23/8/2023).

Aksi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan proses constatering atau pencocokan objek sengketa dengan putusan atau penetapan atau perintah pengadilan terhadap aset berupa rumah dua lantai dan ruko.

Pemilik aset bersama kerabat dan warga setempat bertahan di jalan masuk rumah hingga akhirnya petugas berseragam lengkap dengan tameng dan tongkat mendorong paksa warga. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan, petugas polisi harus memaksa warga untuk mundur.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mustika Bangsa yang mendampingi pemilik objek rumah, Wisnudin mengatakan, pengawalan pembacaan constatering yang dilakukan terlalu berlebihan. Belum lagi dengan ratusan personel yang dikerahkan ke rumah pemilik aset hingga sampai menurunkan anjing K9.

"Kami anggap ini berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum," ujarnya usai pembacaan con-

statering.

Wisnudin menjelaskan, semestinya constatering dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan ketika lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setelah melalui proses lelang, kemudian dilakukan pengosongan dalam objek aset yang disengketakan. "Harusnya dilakukan satu atau dua tahun lalu," jelasnya.

Sementara itu pemilik rumah, Surianti menambahkan, pihaknya memang memiliki hutang di salah satu BankBUMN di Balikpapan. Pinjaman itu dilakukan pada tahun 2019 lalu,

mulanya cicilan yang diajukan oleh Surianti untuk tambahan modal usaha dengan menjaminkan aset rumahnya itu berjalan lancar.

Namun saat Covid-19 melanda, Surianti pun mulai kebingungan untuk melakukan pembayaran. Ia sempat mengajukan keringanan ke pihak bank karena kondisi usaha yang dibangunnya saat itu sepi, belum lagi kebijakan pembatasan yang dilakukan secara merata saat itu membuat bisnisnya lesu.

"Saya meminta keringan beberapa kali bahkan bersurat secara resmi tapi tidak ditanggapi oleh pihak bank,



saya bersurat ada 3 - 4 kali. Saya datang ke bank 3 kali, tapi tidak ada jalan saya dikasih," ujar Surianti.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dengan sepihnya usaha yang dibangun karena wabah Covid-19 saat itu, Surianti makin dibuat bingung dengan kedatangan petugas lelang ke rumahnya, tepatnya pada 10 Mei 2023 lalu. Surianti pun terkejut dengan surat peringatan yang ia terima sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya Surianti tak pernah menerima SP apa lagi menandatangani.

Di dalam surat itu, dua aset berupa rumah dan ruko miliknya itu dijual dengan total senilai Rp 1,2 miliar. Ditambah lagi Surianti harus menyisakan utang yang harus dibayar senilai Rp 509 juta. "Yang saya sesalkan oknum bank ini kenapa dijual, sedangkan saya mau bayar utang saya," jelasnya.

Ditambahkan Wisnudin, bahwa proses constatering yang dilakukan hari ini terkesan dipaksakan. Ia akan melanjutkan proses hukum yang telah dilayangkan ke Polda Kaltim terkait dugaan pemalsuan tanda

tangan oleh oknum Bank BUMN di Balikpapan.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengawal proses kasasi dan perlawanan pidananya di proses banding di Pengadilan Tinggi. "Kami akan meneruskan proses-proses seperti yang sedang berjalan di Polda Kaltim saat ini, yakni melaporkan oknum pihak bank yang diduga melakukan tanda tangan palsu," tutupnya. **(bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

Grand Kartika HOTEL

Paket MAKSIMAL Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2 Rp **90rb** nett /pax

Paket Ber3 Rp **130rb** nett /pax

FREE Ice Tea

Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE 1 pax comp. Light Meal

www.hotelgrandkartika.com

Kebakaran Hebat Landa Balikpapan, Hanguskan Rumah Warga di Sepinggian

BALIKPAPAN - Musibah kebakaran kembali melanda Kota Balikpapan, tepatnya di RT 38 Kelurahan Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kamis (24/8/2023) sekitar pukul 8.30 WITA. Api dengan cepat membesar dari sebuah rumah warga yang mayoritas berbahan kayu. Diperparah dengan angin yang berhembus kencang, api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya.

Seorang warga setempat, Siska, menceritakan, saat itu, dirinya tengah memasak di dapur. Namun, suara aneh yang terdengar membuatnya keluar rumah, dan ia terkejut ketika melihat api yang sudah membesar. "Saya pas masak, ada suara disamping itu pas saya keluar sudah ada api," cerita Siska dengan wajah terkejut.

Tim pemadam kebakaran BPBD Kota Balikpapan saat ini tengah berupaya keras memadamkan api. Sedikitnya, 6 unit mobil pemadam kebakaran (PMK) dan water supply dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran ini.



Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



Kode Promo

BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*





THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang

Kebutuhan Air di Rutan Tanah Grogot Dipastikan Aman

PASER-Menghadapi musim kemarau panjang, ketersediaan air bersih di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2 B Tanah Grogot bagi Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) dipastikan tercukupi karena mengandalkan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan.

“Insya Allah kebutuhan air sangat mencukupi selama musim kemarau ini,” kata Kepala Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot, Bayu Muhammad, Rabu (23/8/2023).

Kendati sudah memasuki bulan ketiga musim kemarau, pihaknya menjamin ketersediaan untuk 715 WBP masih tercukupi. Bahkan kondisi air dipastikan layak konsumsi berdasarkan hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Paser.

“Ada kandungan obat-obatan, dan bakteri tapi itu sedikit. Bakteri ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh,” urainya.

Dijelaskan Bayu, Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot memiliki tiga sumber air yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di antaranya sumur bor, sumber air dari Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan pihak ketiga.

Sebelumnya diketahui, mengha-



TB/MEDIA KALTIM

Kepala Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot, Bayu Muhammad

dapi perubahan iklim yang semakin ekstrem dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih, jadi kekhawatiran masyarakat saat ini, tak menutup kemungkinan bagi WBP.

WBP di Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot berasal dari 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara

(PPU) dan Kabupaten Paser sendiri. Sementara itu, kapasitas Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot melampaui dari ketersediaan yang seharusnya menampung 160 WBP. (bs)

Penulis : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari

Akses Jalan Dibuka, PLN Bakal Bangun Jaringan Listrik Menuju Desa Harapan Baru

PASER-Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersiap membangun jaringan menuju Desa Harapan Baru di Kecamatan Kuaro sehubungan telah dibukanya akses jalan menuju desa tersebut dan Desa Muara Paser di Kecamatan Tanah Grogot.

Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tanah Grogot, Nur Khamdan menyampaikan, akses jalan menjadi dukungan utama bagi PLN untuk melaksanakan pembangunan jaringan listrik ke desa.

“Selama kondisi jalan bisa dilewati oleh kendaraan pengangkut material kami, maka kami bisa saja mengerjakan jaringan ke desa-desa,” ucap Nur Khamdan, Rabu (23/8/2023).

Disampaikannya, untuk saat ini jalan menuju dua desa tersebut dalam penanganan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Pihaknya juga telah memeriksa akses jalan menuju Desa Muara Paser dan Desa Harapan Baru.

Nanti hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan langsung kepada pihak Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Kaltim sebagai pelaksana pembangunan jaringan listrik.

“Pembangunan listrik desa nanti akan dikerjakan oleh PLN UP2K Kaltim yang ada di Samarinda, kami hanya melaksanakan pemeriksaan kondisi jalan menuju desa yang sela-

lu kami laporkan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, kondisi jalan menuju Desa Muara Paser dan Harapan Baru merupakan kawasan rawa. Untuk itu, ULP PLN Tanah Grogot akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ingin membangun jaringan.

“Kami lihat untuk sisi tepi jalannya masih rawa, jadi nanti bersama dengan Dinas PU akan berkoordinasi terkait titik pemasangan tiang listrik, apakah boleh di bahu jalan atau memang harus di rawa,” jelasnya. (bs)

Pewartu : Bhakti Sihombing

Editor: Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memberikan pemahaman pada tenaga pendidik di PPU dalam workshop, Rabu (23/8/2023).

Hetifah Ajak Guru Ciptakan Satuan Pendidikan di PPU Bebas Kekerasan Anak

PPU - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian memberikan peningkatan pemahaman perlindungan anak di lingkungan pendidikan di Penajam Paser Utara (PPU). Bertujuan untuk memberikan jaminan dunia pendidikan di daerah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) terselenggara dengan baik dan aman.

Kegiatan itu disampaikan melalui gelaran Workshop Pendidikan dengan tema "Prevention and Handling of Violence in the Learning Environment". Berkolaborasi dengan Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek RI menghadirkan ratusan guru di The Rich Hotel, Kelurahan Lawe-Lawe, Penajam, Rabu (23/8/2023).

Hetifah mengatakan kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka didorong mengisi gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak di mana saja.

"Baik itu di rumah dan di manapun anak berada serta meningkatkan kesadaran peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak," ujar dia.

Tantangan besar dalam dunia pendidikan saat ini, menurut dia, adalah maraknya kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Dampak dari kekerasan salah satunya menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang baik.

"Hak anak itu banyak, salah satunya hak keselamatan. Kita berkeajiban mengkampanyekan kesela-

matan anak di IKN baik itu dari kejahatan seksual, fisik maupun psikis," sebut Hetifah.

Lanjut dia, trauma dapat bertahan seumur hidup terhadap seorang anak. Maka dari itu satuan pendidikan perlu menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi siswa-siswinya dari kekerasan.

"Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dan dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian. Intinya jadilah guru yang baik yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman kepada murid dalam menuntut ilmu di sekolah," beber Hetifah.

Lebih lanjut, setiap sekolah di PPU harusnya memiliki layanan psikologi bagi anak. Untuk memastikan ketika anak-anak mengalami sesuatu

yang mengganggu kemana harus mengaduh.

Widyaprada Ahli Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menambahkan peningkatan ini sangat dibutuhkan untuk PPU. Sebab, tolok ukur pemindahan IKN merupakan alasan yang memang harus disikapi dengan bijak dan tepat sasaran.

“Seperti yang dikatakan Ibu Heti-

fah, Kaltim khususnya PPU itu masa depan Indonesia. Semakin berkualitas dan berkembang kota ini, akan butuh sumber daya manusia yang hebat-hebat untuk negara ini,” ungkapnya.

Salah satu langkah yang harus diambil ialah menciptakan dunia pendidikan yang aman dan nyaman. Aman untuk menyelenggarakan merdeka belajar, yang mengerti ke-mauan para peserta didik.

“Anak-anak dari PPU harus disipa-

kan, agar mereka siap. Kami siapkan generasi mudanya, kebhinekaannya baik, karakternya bagus, akhlaknya mulia dan bagus kompetensinya. Sekolah-sekolah yang aman harus diwujudkan, agar para anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan sempurna,” pungkas Jumeri. (sbk)

Penulis : Nur Robbi

Editor: Nicha Ratnasari

DANDIM CUP KEJURPROV SERI 3 2023

26-27 AGUSTUS 2023

SIRKUIT EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

DRAG BIKE 201 M (KEJURPROV)

KELAS POINT

- DB. 1 - BRACKET 8 DETIK
- DB. 2 - BRACKET 9 DETIK
- DB. 3 - BRACKET 10 DETIK
- DB. 4 - SPORT 2 TAK TUNE UP FRAME STD 185 CC (POINT)

KELAS SUPPORTING

- DB. 5 - BEBEK 4 TAK TUNE UP 180 CC
- DB. 6 - MATIC RANCKA STD INDEKSI 200 CC
- DB. 7 - SPORT 4 TAK RANCKA STD NON DOHC 300 CC
- DB. 8 - MATIC TUNE UP 200 CC
- DB. 9 - BEBEK 2 TAK 116 CC
- DB. 10 - MATIC RANCKA STD 130 CC (MP7)
- DB. 11 - FFA 300 CC
- DB. 12 - BEBEK 4 TAK 130 CC
- DB. 13 - BEBEK 4 TAK 200 CC
- DB. 14 SUNMORI OMR BX KING
- DB. 15 SUNMORI BEBEK 2 TAK 116 CC
- DB. 16 SUNMORI BEBEK 2 TAK 125 CC NON BUILD UP
- DB. 17 SUNMORI BEBEK 2 TAK 130 CC
- DB. 18 SUNMORI SPORT 2 TAK 155 CC
- DB. 19 SUNMORI MATIC INDEKSI RANCKA STD 160 CC
- DB. 20 SUNMORI BEBEK 41T RANCKA STD 150 CC
- DB. 21 SUNMORI SPORT 4T 150 CC

DRAG BIKE 402 M

- DB. 22 BIG MATIC 250 - 400 CC TOURING
- DB. 23 SPORT 250 - 400 CC TOURING
- DB. 24 FFA SPORT
- DB. 25 HARLEY NON TOURING SADDLE BAG
- DB. 26 HARLEY TOURING SADDLE BAG

REGISTRASI PESERTA

KELAS UTAMA

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 510 K

TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 560 K

KELAS SUPPORTING

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 410 K

TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 460 K

KELAS SUNMORI

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 360 K

TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 410 K

LINK PENDAFTARAN :

[HTTPS://LINKTR.EE/DNTIMINGPENDAFTARAN](https://linktr.ee/dntimingpendaftaran)

PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
 MAULIDANI : +62 857-5134-4384
 AYA : +62 831-4400-8571



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazin saat ditemui di runag kerjanya.

Bawaslu PPU Imbau Masyarakat Aktif Cermati DCS

PPU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau kepada masyarakat untuk aktif mencermati Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Penajam Paser Utara (PPU). Partisipasi itu bertujuan untuk memastikan terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas.

Seperti diketahui, KPU PPU mengumumkan DCS pada Sabtu (19/8/2023) dan berlangsung sampai Rabu 23 Agustus 2023. Pada masa pengumuman inilah masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap para calon sementara legislatif atas rekam jejak para kandidat yang akan berkompetisi pada Pileg 2024.

Pencermatan dapat dilakukan dengan mengakses DCS Bacaleg di laman resmi KPU PPU. Masyarakat dapat membuka link kab-penajam.kpu.go.id dalam aplikasi peramban yang terdapat di ponsel atau komputer.

Ketua Bawaslu PPU Mohammad Khazin menyebutkan bahwa saat ini

sedang memasuki tahapan menunggu tanggapan masyarakat terhadap DCS yang ditetapkan oleh KPU. Dalam masa tersebut, berpotensi ada calon yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana.

"Potensi pelanggaran pertama baik administratif maupun pidana. Itu yang perlu diantisipasi kami di Bawaslu, yang kedua potensi sengketa-sengketa," ungkapnya, Rabu (23/8/2023).

Masa sengketa ini, sebutnya, saat tahapan penyusunan Daftar Caleg Tetap (DCT). Penyelesaian sengketa kata dia, ada dua yakni melalui mediasi dan sidang ajudikasi.

"Setelah penetapan DCT, potensi kerawanan yang diantisipasi yakni sengketa. Bisa saja hasil DCT disengketakan oleh partai politik tertentu, apabila ada calonnya yang tidak diloloskan nantinya," jelas Khazin.

Maka dari itu, Khazin menegaskan tahapan tanggapan masyarakat ini merupakan momen yang paling pent-

ing publik mengambil peran sejak awal. Sebab, dalam hal ini tentu saja Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri.

"Tidak mungkin bahwa seluruh kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya ada di Kami. Oleh karena itu, lapis kedua ini masyarakat dan yang ketiga adalah peserta pemilu, dalam artian partai politik dan orang-orangnya," terangnya.

Lebih lanjut, dalam hal pencegahan Bawaslu PPU dalam waktu dekat ini bakal berkoordinasi dengan berbagai pihak. Khususnya lembaga-lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

"Sebagai upaya preventif, akan dilakukan imbauan-imbauan melalui lembaga-lembaga atau kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Karena memang peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu," tutup Khazin. (sbk)

Pewarta : Nur Robbi
Editor: Nicha Ratnasari



Joni Sinatra Ginting

DPRD Samarinda Sayangkan Bacaleg Pasang Algaka Sembarangan

SAMARINDA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Joni Sinatra Ginting mengaku banyak menerima aduan terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (algaka) gambar atau spanduk Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), dengan tidak mengindahkan aturan demi keindahan Kota.

"Saya sebagai anggota Komisi I sangat banyak menerima aduan terkait pemasangan algaka ini, karena mereka menaruh (algaka) tidak sesuai aturan," ujarnya.

Joni memperkirakan kemungkinan hal ini dilakukan oleh Bacaleg yang tidak mengetahui aturan pemasangan algaka.

"Nah ini kemungkinan adalah Caleg baru, seharusnya mereka mengeta-

hui aturan Perwali soal pemasangan algaka tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan ada tempat-tempat yang boleh dipasang algaka dan ada pula tempat yang tidak boleh pemasangan algaka.

"Yang pertama jelas harus ada izin minimal dari Kesbangpol, karena ini masih Bacaleg harus izin di sana partainya. Terus tempat-tempat yang dibolehkan pasang di mana tanya sama pihak yang berwenang, jangan sembarangan memasang Algaka," tambahnya.

Dalam penertiban yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa hari yang lalu, banyak juga Bacaleg yang komplain atas pencabutan Algakanya.

"Bahkan ada camat-camat yang

lapor ke saya, mereka katanya sampai diancam-ancam. Kata saya cabut saja spanduknya dan pindahkan di tempat lain, biarkan mereka pasang sendiri, ini demi estetika kota. Kita punya aturan nggak boleh sembarangan," tegasnya.

Mendengar keluhan dari camat-camat tersebut, Joni sangat menyayangkan perlakuan Bacaleg tersebut, karena sebagai Bacaleg tidak memberikan contoh yang baik.

"Masa hal sepele seperti ini saja nggak bisa taat, bagaimana dengan aturan yang lebih tinggi pasti dilanggar juga sama Bacaleg yang mental seperti ini," keluhnya. (han)

Pewartu : Hanafi
Editor: Nicha Ratnasari



Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni

Masuk Dalam Bursa Calon Pj Kaltim, Ini Tanggapan Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni

SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, menyikapi soal dirinya yang disebut masuk dalam bursa Calon Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yang akan mengisi kekosongan jabatan yang akan ditinggalkan Isran Noor pasca berakhirnya masa jabatannya Oktober nanti.

Mantan Kepala Dinas Parawisata Kaltim ini menyatakan, bahwa siapapun yang akan menjadi Pj Gubernur harus mampu melanjutkan program kerja dari Isran-Hadi.

Ia pun tak menampik bahwa peluang Sekretaris Daerah menjadi Pj Gubernur mengingat eselonisasi yang telah memenuhi syarat

Namun menurutnya, yang terpenting proses pemilihan Pj Gubernur nanti harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sesuai prosedur jadi ikuti saja prosesnya. Bukan mengikuti siapa yang menjabat, tetapi siapapun yang melanjutkan kepemimpinan Guber-

nur saat ini, harus mengikuti ketentuan, sesuai deadline dan sudah ada Pergub-nya," jelas Sri Wahyuni.

DPRDKaltim sendiri melalui Komisi I DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke DPRD Jawa Barat guna konsultasi dan koordinasi terkait prosedur rekomendasi Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagaimana yang diungkapkan Anggota Komisi I Jahidin, Jawa Barat salah satu provinsi yang juga akan mengalami kekosongan jabatan pasca berakhirnya masa jabatan Ridwan Kamil. Kunjungan ke provinsi tersebut, guna melihat prosedur pengusulan calon Pj Gubernur ke Kemendagri.

"Ini yang kita gali (prosedur pengajuan Pj Gubernur) di Jawa Barat, termasuk berapa calon dan kemudian apakah dari fungsional atau struktural," terangnya.

Politisi PKB ini lebih dalam men-erangkan, bila berkaca dari prosedur dari DPRD Jawa Barat yang sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), pimpinan DPRD harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kemendagri untuk menerima petunjuk sesuai dengan Permendagri.

Setelahnya, tiga puluh hari sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir barulah DPRD melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan nama calon dari usulan masing-masing fraksi. Hasil voting, tiga calon yang memiliki suara terbanyak akan diminta untuk memaparkan visi misinya, yang kemudian akan menjadi rekomendasi ke Kemendagri

"Dalam surat Kemendagri menyebutkan DPRD mengusulkan tiga nama calon Pj gubernur atas usulan dari fraksi-fraksi. Kemudian penetapan tiga nama usulan akan disampaikan ke Kemendagri melalui surat balasan," tutup Jahidin. (eky)



RAMAIKAN & IKUTI EVENT NYA YUK

ACARA PUNCAK HUT KE-3 MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

DAFTAR PAKAI KUPON DIGITAL GRATIS

IKUTI JUGA SENAM AEROBIK MASSAL (XEROBIC QUEEN76)

JALAN SEHAT

LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

DAFTAR JALAN SEHAT GRATIS DISINI

<https://registration.myevents.id/contests/1/registration>

INFORMASI 0853 4894 3982 (Adhi)

